MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS

PERATURAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR PER. 007/M.PPN/11/2007

TENTANG

RENCANA KERJA

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 2008

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi masing-masing Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER 002/M.PPN/06/2006 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2008.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2005-2009, selanjutnya disebut Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2005-2009, adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode tahun 2005-2009.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2008, selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2008, adalah

dokumen perencanaan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode tahun 2008.

Pasal 2

Tujuan dan maksud penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2008 adalah sebagai :

a. penjabaran Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2005-2009;

b. landasan bagi seluruh unit kerja di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan;

c. penyesuaian Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2005-2009 untuk kebutuhan Rencana Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2008.

Pasal 3

Rencana Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2008 memuat rencana kegiatan dari seluruh Unit Kerja Eselon I dan II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 4

Rencana Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2008 berfungsi sebagai bahan acuan evaluasi kinerja Unit Kerja Eselon I dan II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 5

Rencana Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2008 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal ...

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 November 2007

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

PASKAH SUZETTA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR PER. 007 /M.PPN/11/2007
TANGGAL 30 NOVEMBER 2007

RENCANA KERJA (RENJA)
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS
TAHUN 2008

DAFTAR ISI

BAB I LATAR BELAKANG 1

A. Kondisi Umum 1
B. Identifikasi Masalah 4

BAB II TUJUAN DAN SASARAN 6

A. Tujuan Jangka Menengah 6
B. Sasaran Tahun 2008 6
1. Nasional 6
2. Kementerian Negara PPN/Bappenas 6

BAB III KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2008 9

A. Kebijakan Nasional 9
B. Kebijakan Kementerian Negara PPN/Bappenas 9
C. Program Prioritas dan Kegiatan Pokok Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2008 10

BAB IV PENUTUP 17

1 LATAR BELAKANG

A. Kondisi Umum

Penyusunan dokumen rencana pembangunan merupakan amanat dari UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen Rencana yang disusun terbagi dalam 3 (tiga) dimensi waktu jangka panjang, menengah, dan tahunan. Untuk dimensi tahunan Kementerian Negara PPN/Bappenas selain bertanggungjawab untuk menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), juga sebagai Kementerian/Lembaga menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Negara PPN/Bappenas. Penyusunan kedua dokumen tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Renja Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2008 disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2008 yang selanjutnya menjadi bahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara PPN/Bappenas setelah Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan.

Penyusunan Renja Kementerian Negara Bappenas mencakup tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 yang mengamanatkan perumusan kebijakan nasional di bidang perencanaan pembangunan nasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional serta penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi di atas, Kementerian Negara PPN/Bappenas pada tahun 2008 akan melaksanakan berbagai kegiatan prioritas sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) periode 2005-2009, dimana diperlukan penjabaran lebih rinci kedalam rencana kerja (Renja) tahunan. Penyusunan Renja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2008 ini merupakan penjabaran untuk tahun ke 4. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut perlu perumusan prioritas dan sasaran tahun 2008 yang merupakan penajaman dari hasil kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2006 serta perkiraan hasil kegiatan tahun 2007.

Penyusunan Renja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2008 juga diarahkan untuk pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2005-2009. Visi, misi dan tujuan Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2005-2009 memuat peran yang harus

dikembangkan ...

dikembangkan dalam melaksanakan setiap kegiatan. Peran-peran tersebut adalah sebagai berikut :

Peran sebagai **pengambil keputusan**:

- ✓ Sebagai lembaga yang membantu Presiden, Kementerian Negara PPN/ Bappenas berperan membantu Presiden dalam menangani masalah-masalah mendesak dan berskala besar secara terkoordinasi. Peran ini dijalankan sesuai fungsi Kementerian Negara PPN/ Bappenas dalam menjalankan koordinasi pembangunan antar lintas sektoral dan lintas daerah. Langkah nyata dalam alokasi sumberdaya nasional untuk masing-masing instansi pemerintah menjadi tugas dari Kementerian Negara PPN/ Bappenas sebagai lembaga perencanaan pusat. Pengalokasian Sumberdaya nasional ke masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan. Kementerian Negara PPN/ Bappenas juga menetapkan prioritas, arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- ✓ Peran lain dalam pengambil keputusan dalam penanganan masalah-masalah mendesak dan berskala besar tercermin ketika Presiden harus mengambil keputusan dalam penanganan berbagai bencana yang dialami bangsa Indonesia seperti halnya impor beras, kebijakan energi alternatif nasional, kebijakan transportasi publik serta penanganan wabah penyakit menular seperti flu burung dan demam berdarah. Diharapkan peran Kementerian Negara PPN/ Bappenas tersebut dapat membantu Presiden dalam pengambilan keputusan secara optimal.

Peran Sebagai **think-tank**:

- ✓ Kementerian Negara PPN/ Bappenas diharapkan dapat memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berbagai isu pembangunan yang dapat berguna untuk memberikan arahan kebijakan kepada Menteri Teknis dan Presiden, memberikan konsep – konsep kebijakan yang bersifat lintas sektor serta isu – isu mendesak lainnya. Kegiatan *think tank* merupakan kegiatan berbasis pengetahuan terdiri dari eksplorasi dan akuisisi pengetahuan (*knowledge acquisition*), pengembangan dan distribusi pengetahuan (*knowledge distribution*), dan akhirnya penerapan pengetahuan (*knowledge application*) yang terakumulasi sebagai pusat pengembangan kebijakan (*policy center*) yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga perencana pusat memainkan peran dalam sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, program dan kebijakan yang dirancang masing – masing instansi pemerintah guna menghindari tumpang tindih satu dengan yang lainnya.

Peran ...

Peran sebagai **koordinator**:

- ✓ Kementerian Negara PPN/ Bappenas melakukan koordinasi perencanaan **(Rencana Kerja Pemerintah)**, serta memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyususunan rencana kerjanya. Koordinasi ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, Penggangaran, dan pelaksanaan kegiatan. Konsistensi ini penting untuk menjaga pencapaian visi dan misi pemerintahan SBY-JK dan RPJMN tahun 2004-2009 yang menjadi tolok ukur kinerja yang pada akhirnya sebagai pertanggungjawaban kepada pemilihnya.
- ✓ Dalam rangka penyusunan RKP, Kementerian Negara PPN/Bappenas berperan mengelola proses dan mekanisme penyusunan RKP dan Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga
- ✓ Melakukan sinkronisasi, harmonisasi, kebijakan dan program pembangunan di berbagai sektor dan daerah. Tujuan dari tugas ini adalah menciptakan sinergi antar sektor dan antar daerah untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJM maupun dalam rencana kerja pemerintah.
- ✓ Mengkoordinasikan kementerian dan lembaga dalam merancang dan melaksanakan kegiatan sistem deteksi dini dan sistem respons cepat. Sering peristiwa yang membutuhkan penanganan darurat perlu penanganan berbagai kementerian/lembaga pemerintah. Karena sifatnya ini, maka Kementerian Negara PPN/Bappenas menempatkan dirinya untuk menjadi koordinator.

Peran sebagai **administratur**:

- ✓ Melaksanakan perencanaan partisipatif lintas sektor dan daerah di semua jenjang perencana, agar terbentuk rasa memiliki dari daerah terhadap kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh pemerintah pusat.
- ✓ Melakukan penilaian kelayakan kegiatan yang akan dibiayai oleh bantuan luar negeri baik dalam bentuk pinjaman dan hibah (termasuk penerusan pinjaman dan hibah).
- ✓ Dalam rangka pelaksanaan APBN, Kementerian Negara PPN/Bappenas berperan dalam: (1) monitoring dan evaluasi; (2) koordinasi kegiatan kementerian/lembaga; (3) menyusun dan memantau pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan (4) menyusun peraturan lebih rinci pelaksanaan *good governance* dalam pelaksanaan anggaran dan program-program pembangunan.

Untuk mewujudkan peran dan kewenangan yang diharapkan tersebut, maka diperlukan rencana rinci yang dituangkan dalam rencana kerja (renja) tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra Kementerian PPN/Bappenas. Selanjutnya Renja Kementerian Negara PPN/Bappenas ini akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2008.

B. Identifikasi ...

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka mengemban tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra maka permasalahan yang dihadapi untuk tahun 2008 sebagai berikut:

1. Perlunya penajaman terhadap kualitas perencanaan pembangunan melalui analisis, kajian, dan perumusan opsi intervensi kebijakan di bidang perencanaan, termasuk yang bersifat lintas dimensi untuk memetakan gejala dan merespon masalah aktual dalam pencapaian bahan RKP tahun 2010 serta penyiapan bahan penyusunan RPJMN 2010-2014.
2. Perlunya penguatan kemampuan dan budaya organisasi, dalam mendukung pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mendukung pelaksanaan peran pengambilan keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan nasional.
3. Perlunya peningkatan potensi dan kompetensi SDM perencana untuk mendukung tugas-tugas perencana di tingkat pusat dan di tingkat daerah melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan serta dilengkapi dengan dengan peningkatan instrumen, fasilitas perencanaan, pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi yang akurat.
4. Perlunya optimalisasi peningkatan kerjasama yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* dalam penyusunan rencana pembangunan melalui penataan dan peningkatan kualitas hubungan kerja dengan lembaga legislatif dan kementerian/lembaga mitra kerja.
5. Perlunya optimalisasi penyelenggaraan konsultasi dan komunikasi publik dalam rangka menemukenali permasalahan sebagai bahan penyusunan RPJM Nasional tahun 2010-2014.
6. Perlunya pemantapan peran dalam penyusunan RAPBN, Pengelolaan perencanaan PHLN, dan sinkronisasi kebijakan publik, pengendalian termasuk pemantauan dan pengawasan serta evaluasi atas pelaksanaannya agar mencapai target RPJMN tahun 2004-2009.

2 TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Jangka Menengah

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2008 difokuskan pada pencapain tujuan jangka menengah yang termuat dalam Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2005-2009 dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan nasional sesuai agenda RPJMN 2004-2009.
2. Memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan Pembangunan Nasional dan menjadi organisasi handal dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam rangka menjamin tujuan bernegara.

B. Sasaran Tahun 2008

1. Nasional

Sejalan dengan penyusunan RKP tahun 2008 Kementerian Negara PPN/Bappenas wajib berkontribusi untuk menjalankan prioritas pembangunan tahun 2008. Untuk terdapat sasaran nasional yang harus di capai dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2008. Sasaran tersebut adalah melakukan koordinasi perencanaan dan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2008 agar sasaran dan tujuan pembangunan tahun 2008 sesuai dengan rencana dan realisasinya

2. Kementerian Negara PPN/Bappenas

Untuk mencapai tujuan jangka menengah dan mendukung pencapaian sasaran nasional, maka sasaran Renja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2008 adalah :

1. Peningkatan kualitas perencanaan, melalui peningkatan kualitas analisis, kajian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan termasuk yang bersifat lintas dimensi untuk merespon masalah aktual dengan target:
   a. Tersusunnya RKP tahun 2009;
   b. Tersusunnya bahan penyusunan RPJMN 2010-2014;
   c. Tersusunnya bahan penyiapan RKP tahun 2010.
2. Meningkatnya kerjasama yang harmonis dengan seluruh *stakeholder* dalam penyusunan rencana pembangunan dengan penguatan penataan dan peningkatan kualitas hubungan kerja dengan lembaga legislatif dan kementerian/lembaga mitra kerja.

termasuk ...

3. Penyelenggaraan konsultasi dan komunikasi publik dalam rangka menemukenali permasalahan sebagai bahan penyusunan RPJM Nasional tahun 2010-2014.
4. Terwujudnya pemantapan peran dalam penyusunan RAPBN, mengelola perencanaan PHLN, dan sinkronisasi kebijakan publik, pengendalian termasuk pemantauan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaannya dalam mencapai target RPJMN tahun 2004-2009
5. Terselenggaranya kegiatan rutin secara konsisten pada semua jajaran dalam menjalankan peran pengambilan keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan;
6. Meningkatnya akses sarana dan prasarana, penguasaan data/informasi dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional;
7. Meningkatnya potensi dan kompetensi SDM terutama di tingkat pusat dan dilanjutkan di tingkat daerah melalui pendidikan dan pelatihan yang dilengkapi dengan peningkatan instrumen, fasilitas perencanaan, pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi yang akurat dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
8. Meningkatnya efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur Kementerian Negara PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan untuk RKP tahun 2007 dan evaluasi paruh waktu RPJMN tahun 2004-2009. Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi umpan balik untuk peningkatan kualitas dokumen rencana.

3 KEBIJAKAN ...

3 KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2008

A. Kebijakan Nasional

Dalam rangka mencapai sasaran nasional seperti yang telah diuraikan di atas, maka kebijakan nasional tahun 2008 adalah mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah. Prioritas tersebut terdiri dari 8 prioritas nasional yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi, dan Ekspor;
2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan;
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Energi;
4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri; serta
8. Penanganan Bencana, Pengurangan Resiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.

B. Kebijakan Kementerian Negara PPN/Bappenas

Dalam rangka mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional, diperlukan perencanaan yang terkoordinasi dengan baik. Untuk itu, kebijakan di tahun 2008 diarahkan pada upaya – upaya:

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan dalam penyusunan RKP 2009;
2. Penyusunan kajian untuk mendukung masukan bagi penyusunan RKP 2010;
3. Penyiapan *background study* dalam rangka penyiapan Rancangan RPJM Nasional 2010-2014;
4. Melakukan berbagai konsultasi publik dengan pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka perencanaan partisipatif;
5. *Review dan evaluasi* terhadap program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing unit kerja dalam rangka evaluasi RPJMN tahun 2004-2009;
6. Peningkatan kualitas koordinasi pembangunan di tingkat pusat, daerah dan nasional untuk mewujudkan integrasi pembangunan lintas sektor dan fungsi kelembagaan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tingkat Pusat, Provinsi, dan Musrenbang Nasional tahun 2008;

7. Penguatan ...

7. Penguatan data dan informasi pembangunan dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan
8. Mendukung penyelenggaraan kegiatan rutin secara konsisten pada semua jajaran dalam menjalankan peran pengambilan keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan;
9. Meningkatkan akses sarana dan prasarana, penguasaan data/informasi dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional;
10. Peningkatan kemampuan teknis dan strategis lembaga dan SDM perencana tingkat pusat dan daerah baik dalam kecakapan keahlian (*hard-skills*) maupun kompetensinya;
11. Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur Kementerian Negara PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN.

C. Program dan Kegiatan Pokok Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Dalam rangka mencapai tujuan dan melaksanakan kebijakan di atas, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan program dan kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

a. Uraian Program dan Jenis Kegiatan

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan Pembangunan Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Dalam program ini, termasuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 dan penyiapan *background study* untuk penyusunan RPJM Nasional 2010-2014, serta terlibat aktif didalam penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan dan penyusunan database perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan (3) tiga kegiatan pokok:

Kegiatan 1	:	Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/ Lembaga
Kegiatan 2	:	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas Perencanaan Pembangunan
Kegiatan 3	:	Penciptaan Sistem Administrasi Pendukung dan Database Perencanaan Yang Efektif dan Efisien

Kategori ...

Kategori jenis kegiatan yang direncanakan di Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pada Kementerian Negara PPN/Bappenas yaitu :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan
2. Kajian Prakarsa Strategis dan Isu Strategis
3. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
4. Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
5. Penyusunan Database
6. Konsultasi Publik
7. Penyusunan dan penyempurnaan ketatalaksanaan
8. Tugas-tugas yang langsung diberikan Presiden

b. Pagu Indikatif

Pagu indikatif untuk Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan adalah sebesar Rp 226,02 Milyar yang terdiri dari Rupiah Murni Rp. 171,02 Milyar dan Rp. 55 Milyar dari PHLN dengan rincian pagu untuk kegiatan pokok adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Kerjasama Antar Instansi Pemerintah Swasta/Lembaga Rupiah Murni sebesar Rp 71,614 Milyar dan Rp 55 Milyar PHLN;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas Perencanaan Pembangunan sebesar Rupiah Murni Rp 88,307 Milyar;
3. Kegiatan Penciptaan Sistem Administrasi Pendukung dan Database Perencanaan Yang Efektif dan Efisien Rupiah Murni sebesar Rp 11,549 Milyar.

Dari masing-masing ke 3 (tiga) kegiatan diatas terinci pada Lampiran 1-9 dan 11.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara

a. Uraian Program dan Jenis Kegiatan

Program ini dilaksanakan untuk mendukung proses pendidikan, pembinaan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Perencana. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/ Bappenas menetapkan 2 (dua) kegiatan pokok:

Kegiatan 1	:	Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian Negara PPN/Bappenas
Kegiatan 2	:	Pengembangan Kapasitas SDM Perencana

Kategori ...

Kategori kegiatan yang direncanakan di Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara pada Kementerian Negara PPN/Bappenas yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan Aparatur Perencana melalui Sistem Manajemen Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur Perencana
2. Kegiatan Pendidikan/Pelatihan Aparatur Perencana baik untuk perencana pusat maupun perencana daerah

b. Pagu Indikatif

Pagu indikatif untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara adalah sebesar Rp 112 Milyar yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 37 Milyar dan PHLN sebesar Rp. 75 Milyar dengan rincian pagu untuk kegiatan pokok adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian Negara PPN/Bappenas Rupiah Murni sebesar Rp 7 Milyar;
2. Pengembangan Kapasitas SDM Perencana sebesar Rp 105 Milyar yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 30 Milyar dan PHLN Sebesar Rp. 75 Milyar.

Dari masing-masing ke 2 (dua) kegiatan di atas terinci pada Lampiran 11.

3. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik

a. Uraian Program dan Jenis Kegiatan

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan rutin yang meliputi penggajian dan pembayaran pengeluaran listrik, air dan telepon, mendukung Kegiatan kehumasan dan administrasi pimpinan lainnya, mendukung pelaksanaan administrasi pimpinan termasuk penyediaan Dana Operasional Menteri (DOM), mendukung kegiatan lainnya dalam rangka penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan antara lain kegiatan kunjungan/perjalanan dinas pimpinan baik keluar negeri maupun dalam negeri. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan 5 (lima) kegiatan pokok :

Kegiatan 1	:	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan
Kegiatan 2	:	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Kegiatan 3	:	Operasional Menteri/Ketua Lembaga
Kegiatan 4	:	Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan
Kegiatan 5	:	Perencanaan/Penyusunan/Pengembangan Program dan Sistem Prosedur

Kategori ...

Kategori kegiatan yang direncanakan di Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan pada Kementerian Negara PPN/Bappenas yaitu :

1. Koordinasi Pengurusan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
2. Koordinasi Dukungan Kerja Bagi Pimpinan;
3. Kegiatan Opersional dan Pemeliharaan;
4. Penyelenggaraan Rapat Untuk Pimpinan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

b. Pagu Indikatif

Pagu indikatif untuk Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan Rupiah Murni sebesar Rp. 57,852 Milyar yang rincian pagu untuk kegiatan pokok adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Rupiah Murni sebesar Rp 33,766 Miliar;
2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp 19,209 Miliar;
3. Operasional Menteri/Ketua Lembaga Rupiah Murni sebesar Rp 2,105 Miliar;
4. Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan Rupiah Murni sebesar Rp 0,581 Miliar;
5. Perencanaan/Penyusunan/Pengembangan Program dan Sistem Prosedur Rupiah Murni sebesar Rp 2,191 Miliar.

Rincian masing-masing kegiatan tersebut terdapat pada Lampiran 11.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

a. Uraian Program dan Jenis Kegiatan

Program ini dilaksanakan untuk mendukung proses pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) kegiatan pokok :

Kegiatan 1	:	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional
Kegiatan 2	:	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan

Kategori kegiatan yang direncanakan di Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara dan Kepemerintahan pada Kementerian Negara PPN/Bappenas yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi di bidang pelayanan umum internal Bappenas

2. Kegiatan ...

2. Kegiatan Monitoring yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan umum internal Bapenas;
3. Pemeliharaan dan peningkatan Sarana dan Prasana Fisik Bappenas;
4. Menunjang terciptanya *e-government* dan *e-services* di lingkungan Bappenas;

b. Pagu Indikatif

Pagu indikatif untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Rupiah Murni sebesar Rp 30,588 Miliar yang rincian pagu untuk kegiatan pokok adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional Rupiah Murni sebesar Rp 27,958 Miliar;
2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Rupiah Murni sebesar Rp 2,630 Miliar.

Rincian masing-masing kegiatan tersebut terdapat pada Lampiran 11.

5. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

a. Uraian Program dan Jenis Kegiatan

Program ini diusulkan dapat terlaksana pada tahun 2007 dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan aparatur di lingkungan Bappenas sehingga dapat tercipta *good governance* di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas terutama sebagai kementerian/lembaga percontohan bebas KKN. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan tiga kegiatan pokok :

Kegiatan 1	:	Pembinaan/ Koordinasi/ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Kegiatan 2	:	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan.
Kegiatan 3	:	Pendayagunaan/ Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan
Kegiatan 4	:	Penyelenggaraan/ Penataan/ Peningkatan Sistem dan Prosedur Informasi Pengawasan.
Kegiatan 5	:	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian/ Lembaga.
Kegiatan 6	:	Peningkatan Intensitas dan Kualitas Pelaksanaan Pengawasan dan Audit Internal, Eksternal, dan Pengawasan.

Kegiatan-kegiatan di atas dilaksanakan untuk mencakup proses pendidikan, pembinaan dan pelatihan di bidang pengawasan dan audit, peningkatan sistem informasi pengawasan fungsional,

evaluasi kinerja yang terkait secara keuangan/penganggaran dan kelembagaan dan berbagai kegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas aparatur Kementerian Negara PPN/Bappenas.

b. **Pagu Indikatif**

Pagu indikatif untuk Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Rupiah Murni sebesar Rp 3,5 Miliar yang dirinci sebagai kegiatan berikut:

1. Pembinaan/ Koordinasi/ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rupiah Murni sebesar Rp 0,299 Miliar;
2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rupiah Murni sebesar Rp 0,1 Miliar;
3. Pendayagunaan/ Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Rupiah Murni sebesar Rp 0,42 Miliar;
4. Penyelenggaraan/ Penataan/ Peningkatan Sistem dan Prosedur Informasi Pengawasan Rupiah Murni sebesar Rp 0,269 Miliar;
5. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian/ Lembaga Rupiah Murni sebesar Rp 1,194 Miliar.
6. Peningkatan Intensitas dan Kualitas Pelaksanaan Pengawasan dan Audit Internal, Eksternal, dan Pengawasan Rupiah Murni sebesar Rp 1,218 Miliar.

Rincian masing-masing kegiatan tersebut terdapat pada Lampiran 10.

4. PENUTUP ...

4 PENUTUP

Renja Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2008 merupakan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2008 Kementerian Negara PPN/Bappenas. Dalam proses menuju RKA Kementerian Negara PPN/Bappenas, Renja Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2008 akan disesuaikan dengan pagu sementara yang diedarkan oleh Menteri Keuangan. Program dan kegiatan yang terdapat pada Renja Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2008 akan disesuaikan sejalan dengan proses perencanaan dan pengganggaran. Penyesuaian tersebut pada akhirnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2008.

Dengan disahkannya DIPA tersebut maka unit kerja eselon I dan II dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

RENCANA ...

RENCANA PENCAPAIN RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RENCANA KERJA NEGARA PPN/BAPPENAS TAHUN 2008

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	PENCAPAIN TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	
Menjadi institusi perencana yang handal, kredibel dan secara proaktif ikut berperan dalam penentuan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara	Meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan nasional sesuai agenda RPJMN 2004-2009	1. Peningkatan kualitas perencanaan, melalui peningkatan kualitas analisis, kajian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan termasuk yang bersifat lintas dimensi untuk merespon masalah aktual dengan target: - Tersusunnya RKP tahun 2009; - Tersusunnya bahan persipan penyusunan RPJMN 2010-2014; - Tersusunnya bahan penyiapan RKP tahun 2010. 2. Terwujudnya pemantapan peran dalam penyusunan RAPBN, mengelola perencanaan PHLN, dan sinkronisasi kebijakan publik, pengendalian termasuk pemantauan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaannya dalam mencapai target RPJMN tahun 2004-2009	Mendorong peningkatan kualitas perencanaan dalam penyusunan RKP 2009, penyiapan *background study* dalam rangka penyiapan Rancangan RPJM Nasional 2009-2014, penyusunan kajian untuk mendukung masukan bagi penyusunan RKP 2010, serta *review* terhadap program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing unit kerja dalam rangka evaluasi RPJMN tahun 2004-2009.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas Perencanaan Pembangunan	- Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 - Tersusunnya *background study* dalam rangka penyiapan Rancangan RPJM Nasional 2010-2014 - Penyusunan *Blue book* - Tersusunnya *review* terhadap program dalam rangka evaluasi RPJMN tahun 2004-2009 - Tersusunnya bahan penyiapan RKP tahun 2010
				Penguatan data dan informasi pembangunan dalam menunjang peningkatan kualitas Perencanaan		Kegiatan Penciptaan Sistem Administrasi Pendukung dan Database Perencanaan Yang Efektif dan Efisien	Tersusunnya database perencanaan pembangunan pada tiap bidang pembangunan
	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan *stakeholder* untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pembangunan nasional		Lebih terbangun kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholder dalam penyusunan rencana pembangunan dengan penguatan penataan dan peningkatan kualitas hubungan kerja dengan lembaga legislatif dan kementerian/lembaga mitra kerja	Peningkatan kualitas koordinasi pembangunan di tingkat pusat, daerah dan nasional untuk mewujudkan integrasi lintas sektor pembangunan dan fungsi kelembagaan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tingkat Pusat, Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional tahun 2008		Kegiatan Kerjasama Antar Instansi Pemerintah Swasta/Lembaga	- Terselenggaranya Rapat Koordinasi Tingkat Pusat, Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional tahun 2008 - Terselenggarnya konsultasi publik dalam rangka penyusunan RPJM Nasional tahun 2010-2014
			Terwujudnya penyelenggaraan konsultasi dan komunikasi publik dalam rangka menemukenali permasalahan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan RPJM Nasional tahun 2010-2014				

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	PENCAPAIN TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	
	Mewujudkan institusi perencana sebagai mitra dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan kebijakan nasional lainnya	Memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan Pembangunan Nasional dan menjadi organisasi yang handal dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam rangka menjamin tujuan bernegara	Terselenggaranya kegiatan rutin secara konsisten pada semua jajaran dalam menjalankan peran pengambilan keputusan, think tank, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan	Mendukung penyelenggaraan kegiatan rutin secara konsisten pada semua jajaran dalam menjalankan peran pengambilan keputusan, think tank, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Operasional Menteri/Ketua Lembaga Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan Perencanaan/Penyusunan/Pengembangan Program dan Sistem Prosedur	- Terselenggaranya peyelenggaraan kegiatan rutin termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai - Terselenggaranya dukkungan kerja bagi Pimpinan Kementerian Negara PPN/Bappenas
			Meningkatnya akses sarana dan prasarana, penguasaan data/informasi dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional	Meningkatkan akses sarana dan prasarana, penguasaan data/informasi dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan	- Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi karyawan Kementerian Negara PNN/Bappenas - Terselenggaranya pelayanan umum dan operasional yang menunjang Tupoksi Kementerian Negara PPN/Bappenas - Terpeliharanya fasilitas kerja Kementerian Negara PNN/Bappenas
	Mengembangkan kapasitas, potensi dan kompetensi lembaga perencanaan dalam menyusun perencanaan pembangunan secara berkeadilan dan berkelanjutan		Meningkatnya potensi dan kompetensi SDM perencana di pusat dan di daerah melalui pendidikan dan pelatihan serta dilengkapi dengan peningkatan instrumen, fasilitas perencanaan, pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi yang akurat dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional	Peningkatan kemampuan teknis dan strategis lembaga dan SDM perencana tingkat pusat dan daerah baik dalam *domain of experties* (*hard-skills*) maupun *domain of competencies* (*soft-skills*)	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara	Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian Negara PPN/Bappenas Pengembangan Kapasitas SDM Perencana	Pelaksanaan Diklat di dalam negeri dan luar negeri bagi SDM perencana di tingkat pusat dan daerah
			Meningkatnya efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur Kementerian Negara PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN	Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur Kementerian Negara PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Pembinaan/ Koordinasi/ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pendayagunaan/ Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan/ Penataan/ Peningkatan Sistem dan Prosedur Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian/ Lembaga	Terselenggaranya sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur Kementerian Negara PPN/Bappenas

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

PASKAH SUZETTA

ANAK LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR PER. /M.PPN/11/2007
TANGGAL NOVEMBER 2007

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDM & Kebudayaan	Terselenggaranya Koodinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
I	DIREKTORAT KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT	
1	Kajian Pembangunan Kesehatan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Background Study	Tersusunnya Kajian Pembangunan Kesehatan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Background Study
2	Pemantauan dan Pelaksanaan RKP Tahun 2007 Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Tersusunnya dokumen laporan dan rekomendasi pemantauan atas pelaksanaan program bidang kesehatan dan gizi masyarakat dalam RKP 2008
3	Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Pembangunan Bidang Kesehatan dan Gizi masyarakat	Tersedianya dokumen laporan evaluasi Program Pembangunan Bidang Kesehatan dan Gizi masyarakat
4	Pengembangan Database Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Tersusunnya laporan pengembangan database bidang kesehatan dan gizi masyarakat
5	Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Tahun 2006-2010	Tersusunnya rencana kerja tahunan, laporan hasil pertemuan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerjasama pemerintah RI dan UNICEF
6	Koordinasi Pengelolaan Perencanaan Bidang Kesehatan dan Gizi masyarakat	Tersusunnya laporan tentang pengelolaan perencanaan bidang kesehatan dan gizi masyarakat
II	DIREKTORAT KEPENDUDUKAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1	Kajian Implikasi Proyeksi Penduduk Berdasarkan SUPAS 2005	Tersusunnya laporan kajian Implikasi Proyeksi Penduduk Berdasarkan SUPAS 2005
2	Koordinasi Perencanaan Kebijakan dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Kebijakan dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
3	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Anak	Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Anak
4	Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Tersusunnya Laporan Pemantauan Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
5	Pengembangan Database di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Tersedianya Database di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
6	Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA Siklus ke-7 (2006-2010)	Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program bantuan UNFPA agar dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna dengan cara memfasilitasi berbagai kegiatan koordinasi (perencanaan, implementasi, pemantauan, pelaporan dan evaluasi)
III	DIREKTORAT KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1	Background Study: Pembangunan Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 2010 - 2014	Tersusunnya dokumen laporan studi dan rekomendasi pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga 2010 - 2014.
2	Koordinasi Perencanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Bidang Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Terumuskannya rekomendasi kebijakan dan program pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.
3	Evaluasi Pembangunan Bid. Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tersusnnya dokumen laporan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga
4	Pengembangan Database Bid. Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tersedianya data dan informasi di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.
5	Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2008 Pembangunan Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Tersusnnya dokumen laporan pemantauan atas pelaksanaan RKP Tahun 2008 bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.
IV	DIREKTORAT AGAMA DAN PENDIDIKAN	
1	Background Study Pembangunan Bidang Agama & Pendidikan	Tersusunnya rekomendasi Study Pembangunan Bidang Agama & Pendidikan
2	Koordinasi Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan	Tersusunnya laporan hasil diskusi ttg isu-isu strategis yg terkait dg pemb. Agama dan pendidikan sbg bahan penyusunan kebijakan

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
3	Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2008 Bidang Agama dan Pendidikan	Tersusunnya dokumen laporan pemantauan atas pelaksanaan program bidang agama dan pendidikan dalam RKP 2008.
4	Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Program Ibadah haji	Tersedianya dokumen laporan evaluasi penyelenggaraan ibdah haji
5	Pengembangan Database Bidang Agama dan Pendidikan	Tersusunnya laporan pengembangan database bidang agama dan pendidikan
6	Koordinasi Strategis Program Pelaksanaan PHLN Bidang Pendidikan Untuk Proyek Indonesia - German Institute (IGI) Phase II	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan IGI-II yang bersifat lintas sektor dengan melibatkan antara lain Bappenas, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Departemen Perindustrian serta tersusunnya laporan hasil pertemuan koordinasi kegiatan IGI-II yang dilakukan oleh Direktorat Agama dan Pendidikan.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

PASKAH SUZETTA

ANAK LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR PER. 007 /M.PPN/11/2007
TANGGAL 30 NOVEMBER 2007

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Terselenggaranya Koodinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan
I	DIREKTORAT HUKUM DAN HAM	
1	Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2004-2009 dan Focus Group Discussion Penyusunan RAD PK serta sosialisasi Rekomendasi Tim Implementasi Konvensi Anti Korupsi 2003	Terselenggaranya Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2004-2009 dan Focus Group Discussion Penyusunan RAD PK serta sosialisasi Rekomendasi Tim Implementasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Direktorat Hukum dan HAM
2	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Bidang Hukum dan HAM	Terselenggaranya Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Bidang Hukum dan HAM
3	Pemantauan Pelaksanaan RKP 2008 Bidang Hukum dan HAM	Tersusunnya Laporan Pemantauan Pelaksanaan RKP 2008 Bidang Hukum dan HAM
4	Evaluasi Pelaksanaan RKP 2008 Program Pembangunan Bidang Hukum dan HAM	Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKP 2008 Bidang Hukum dan HAM Direktorat Hukum dan HAM
5	Pengembangan Database Pembangunan Hukum di Indonesia	Termutakhirnya Database Perencanaan Pembangunan Di Bidang Hukum Direktorat Hukum dan HAM
6	Backgroundstudy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Bidang Hukum dan HAM	Tersusunnya dokumen laporan studi dan rekomendasi pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Bidang Hukum dan HAM
II	DIREKTORAT ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1	Pengembangan Database Bidang Analisa Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Database Bidang Analisa Peraturan Perundang-undangan
2	Koordinasi Perencanaan Program Bidang Analisa Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Program Bidang Analisa Peraturan Perundang-undangan

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
3	Kajian Hukum Investasi Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Peundangan-Undangan Di Bidang Investasi Tahun 2008	Tersusunnya Laporan Kajian Hukum Investasi Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Peundangan-Undangan Di Bidang Investasi Tahun 2008
III	DIREKTORAT PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
1	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan	Tersusunya Laporan evaluasi pelaksanaan program pertahanan dan keamanan dalam rangka kesinambungan pembangunan nasional berdasarkan prioritas pembangunan serta penilaian atas pencapaian tujuan/sasaran program sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan pada RPJM 2004-2009
2	Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan	Keterpaduan pelaksanaan program pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan sesuai dengan RPJM 2004-2009
3	Monitoring Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan	Laporan kegiatan monitoring pelaksanaan program dalam RKP 2008 di bidang pertahanan dan keamaman
4	Pengembangan Data Base Bidang Pertahanan dan Keamanan	Tersedianya database bidang pertahanan dan keamanan yang *up to date* dan dapat digunakan untuk tujuan perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan nasional
IV	DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI	
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi	Tereselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi
2	Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi	Terselenggaranya Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi
3	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 Bidang Komunikasi	Tersusunya laporan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi
4	Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi	Tersedianya Basis Data dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi
5	Pengelolaan Dana Hibah Support Democratic and Decentralized Governance (USAID Grant Agreement No. 479-0020)	Terkelolanya Dana Hibah USAID untuk SOAg Democratic and Decentralized Governance
6	Studi Kebijakan Strategi Pengembangan Masyarakat Sipil Dalam Konteks Hubungan Negara dan Masyarakat	Rekomendasi Kebijakan Strategi Pengembangan Masyarakat Sipil Dalam Konteks Hubungan Negara dan Masyarakat

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
IV	DIREKTORAT APARATUR NEGARA	
1	Kajian Key Performance Indikator Instansi Pemerintah	Rekomendasi Key Performance Indikator Instansi Pemerintah
2	Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	Terselenggaranya Perencanaan Program Pembangunan Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
3	Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	Tersusunnya Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
4	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa untuk Background Study Penyusunan RPJMN 2010-2014	Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
5	Pengembangan Data Base Pembangunan Untuk Mendukung Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	Tersedianya Pengembangan Data Base Pelaksanaan Program Pembangunan Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
6	Dana Pendukung Loan dan Hibah STAR SDP	Terlaksananya kegiatan Loan - Grant Kebijakan Reformasi Audit Publik/Project STAR-SDP (PHLN)
7	Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik	Terselenggaranya dukungan Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

PASKAH SUZETTA

ANAK LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR PER. 007 /M.PPN/11/2007
TANGGAL 30 NOVEMBER 2007

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Kemiskinan, UKM, dan Ketenagakerjaan

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kimiskinan, UKM, & Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Koodinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah
I	DIREKTORAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
1	Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan 2009-2014: Percepatan Pencapaian MDGs	Rekomendasi kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan 2009-2014: Percepatan Pencapaian MDGs
2	Koordinasi Pelaksanaan dan Pembiayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan dan pembiayaan Program Nasional Pemberdayan masyarakat (PNPM)
3	Pemantauan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	Terselenggaranya pemantauan pelaksanaan pelaksanaan dan pembiayaan program nasional pemberdayan masyarakat
4	Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Penilaian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
5	Pengembangan Sistem Informasi dan Database Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	Tersusunnya standarisasi database program nasional pembardayaan masyarakat
6	IDF GRANT for Making the Link: From Best Practices to Policy Formulation Project TF-057278 (Hibah)	Terkoordinasinya IDF GRANT for making the link: from best practices to policy formulation project TF-057278
II	DIREKTORAT KETENAGAKERJAAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA	
1	Studi Background Untuk Persiapan RPJMN 2009-2014 Bidang Ketenagakerjaan	Tersusunnya kerangka kebijakan untuk RPJMN 2009 - 2014
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan	Terkoordinasinya program - program pembangunan ketenagakerjaan
3	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan RKP 2008 Bidang Ketenagakerjaan	Tersusunnya hasil pemantauan RKP bidang ketenagakerjaan tahun 2008
4	Evaluasi Kebijakan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan	Tersusunnya laporan evaluasi kebijakan iklim ketenagakerjaan
5	Penyusunan Database Ketenagakerjaan	Tersedianya informasi data ketenagakerjaan terkini

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Kemiskinan, UKM, dan Ketenagakerjaan

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
III	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM	
1	Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Di Bidang Pemberdayaan Kop dan UMKM	Terselangaranya Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Di Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
2	Pemantauan Pelaksanaan Program-program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Tersusunnya Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program-program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
3	Evaluasi Pelaksanaan RKP bidang Pemberdayaan KUKM Tahun 2007	Tersusunya Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKP bidang Pemberdayaan KUKM Tahun 2007
4	Pengembangan Database Koperasi dan UMKM	Tersedianya Database Koperasi dan UMKM
6	Background Study RPJM 2010-2014 Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Tersusunnya Background Study RPJM 2010-2014 Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
IV	DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
1	Background Study Persiapan Penyusunan RPJM 2009-2014 Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat	Tersusunnya Background Study Persiapan Penyusunan RPJM 2009-2014 Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat
2	Koordinasi Perencanaan Program-program Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat	Terselangaranya Koordinasi Perencanaan Program-program Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat
3	Pemantauan Pelaksanaan Program-program Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial	Tersusunnya Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program-program Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial
4	Evaluasi Program-program Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial	Tersusunnya Laporan Evaluasi Program-program Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial
5	Penyusunan Database Program-program Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat	Tersedianya Database Program-program Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

PASKAH SUZETTA

ANAK LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR PER. 007 /M.PPN/11/2007
TANGGAL 30 NOVEMBER 2007

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Ekonomi

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terselenggaranya Koodinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
I	DIREKTORAT PERENCANAAN MAKRO	
1	Kajian Penyusunan Sasaran Indikatif Ekonomi Makro RPJM Ekonomi Makro 2010-2014	Tersedianya hasil kajian sasaran indikatif RPJM dan arah kabijakan makro ekonomi RPJM 2010-2014
2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Ekonomi Makro Tahun 2008	Terselenggaranya koordinasi di bidang perencanaan ekonomi makro dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2009
3	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan PJM 2004-2009 dan RKP di Tahun 2008	Terselenggaranya pemantauan kinerja ekonomi makro RKP Tahun 2008
4	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2007 dan MID-TERM REVIEW RPJM 2004-2009	Terselenggaranya evaluasi kinerja RKP bidang Ekonomi Makro Tahun 2007
5	Kegiatan Basis Data Ekonomi Makro Tahun 2008	Terciptanya basis data di bidang ekonomi makro
II	DIREKTORAT KEUANGAN NEGARA	
1	Kajian Pengelolaan Resiko Fiskal Sebagai Dampak Penerbitan Obligasi Pemerintah	Tersedianya Hasil Tinjauan Dan Rekomendasi Mengenai Pengelolaan Resiko Fiskal Sebagai Dampak Penerbitan Obligasi Pemerintah
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Terselenggaranya konsultasi serta koordinasi dengan mitra kerja dan instansi terkait lainnya tentang issue serta kebijakan di bidang keuangan negara guna penyusunan RKP TA 2009
3	Penyusunan dan Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2008	Terselenggaranya pemantauan terhadap pelaksanaan RKP Tahun 2008 yang hasilnya sebagai masukan atau perbaikan/ penyempurnaan dan penyusunan perencanaan program-program periode selanjutnya

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Ekonomi

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
4	Evaluasi Pelaksanaan Program Keuangan Negara	Tersusunnya hasil evaluasi kinerja pembangunan sebagai bahan masukan untuk perbaikan/ penyempurnaan pelaksanaan program-program pembangunan periode selanjutnya
5	Pengembangan Basis data Keuangan Negara	Tersedianya basis data yang mutahir yang mencakup kebijakan, peraturan perundang-undangan dan data/informasi secara terus menerus di bidang Keuangan Negara untuk membantu proses penyusunan program pembangunan pemantauan dan evaluasi program pembangunan tersebut serta analisis kebijakan pembangunan
III	DIREKTORAT JASA KEUANGAN DAN ANALISIS MONETER	
1	Kajian Pengembangan Kebijakan Lembaga Pembiayaan Mikro	Tersusunnya kajian berupa pemetaan dan kebijakan pengembangan lembaga keuangan mikro
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Jasa Keuangan dan Analisis Moneter	Terselenggaranya koordinasi di bidang jasa keuangan dan analisis moneter dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2009.
3	Pemantauan Pelaksanaan RPJM 2004-2009 dan RKP Tahun 2008	Terselenggaranya pemantauan kinerja Program Stabilitas Ekonomi dan Sektor Keuangan serta Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan Tahun 2008.
4	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 2007	Terselenggaranya evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah 2007
5	Basis Data Jasa Keuangan Berbasis Syariah	Terbangunnya basis data jasa - jasa lembaga keuangan berbasisi syariah
IV	DIREKTORAT PERDAGANGAN,INVESTASI DAN KEI	
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja dan instansi terkait lainnya tentang issue serta kebijakan di bidang perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional guna penyusunan RKP tahun 2009
2	Monitoring Perencanaan Pembangunan Bidang Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	Terselenggaranya kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional, yg hasilnya sebagai masukan atau perbaikan/ penyempurnaan dan penyusunan perencanaan pembangunan periode selanjutnya
3	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	Tersusunnya hasil evaluasi kinerja pembangunan di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional sebagai bahan masukan untuk perbaikan/ penyempurnaan pelaksanaan program-program pembangunan periode selanjutnya

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Ekonomi

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
4	Database Perencanaan Pembangunan Bidang Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	Tersedianya basis data termutakhirkan yang mencakup kebijakan, peraturan perundang-undangan dan data/informasi secara terus menerus di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional untuk membantu proses penyusunan program pembangunan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan serta analisis kebijakan pembangunan
5	Background Study RPJMN 2010-2014 Bidang Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional	Tersusunnya Background Study RPJMN 2010-2014 Bidang Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional
V	DIREKTORAT INDUSTRI, IPTEK DAN BUMN	
1	Background Study RPJMN 2010-2014 Bidang Industri, Iptek, dan BUMN	Tersusunnya Background Study RPJMN 2010-2014 Bidang Industri, Iptek, dan BUMN
2	Evaluasi Program Pembangunan Industri, Iptek dan BUMN 2008	Tersedianya Evaluasi pelaksanaan laporan program pembangunan tahun anggaran 2007 pada sektor Industri, Iptek dan BUMN.
3	Koordinasi Pembangunan Sektor Industri, Iptek BUMN 2008	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pada sektor Industri, Iptek dan BUMN guna mendukung keberhasilan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2009
4	Monitoring Pembangunan Sektor Industri, Iptek BUMN	Terselenggaranya Pemantauan Kinerja pembangunan sektor Industri tahun 2008
5	Penyusunan Database Pembangunan sektor Industri, Iptek BUMN	Tersedianya Database pembangunan sektor Industri,Iptek dan BUMN yang akurat, dan akuntabel

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

PASKAH SUZETTA

ANAK LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR PER. 007 /M.PPN/11/2007
TANGGAL 30 NOVEMBER 2007

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Koordinasi Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2	Sekretariat Tim Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalteng	Terselenggaranya Dukungan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalteng
I	DIREKTORAT PANGAN DAN PERTANIAN	
1	Kajian Penyusunan Strategi Pengembangan Industri Pertanian Melalui Peningkatan Sistem Pelayanan Agribisnis	Tersusunnya Strategi Pengembangan Industri Pertanian Melalui Peningkatan Sistem Pelayanan Agribisnis
2	Koordinasi Pembangunan Revitalisasi Pertanian	Terselenggaranya Koordinasi Pembangunan Revitalisasi Pertanian
3	Pemantauan Pembangunan Revitalisasi Pertanian	Tersusunnya Laporan Monitoring Pembangunan Revitalisasi Pertanian
4	Evaluasi Pembangunan Revitalisasi Pertanian : Pencapaian Sasaran RPJM dan Konsep RPJM 2010-2015	Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan Revitalisasi Pertanian Tahun 2008
5	Pengembangan/Pembangunan Database bidang Pangan dan Pertanian	Tersedianya Database Pangan dan Pertanian Tahun 2008
II	DIREKTORAT KEHUTANAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
1	Penyusunan Strategi Pengembangan Jasa Lingkungan Hutan	Tersusunnya Strategi Pengembangan Jasa Lingkungan Hutan
2	Koordinasi Program dan Kebijakan Sektor Kehutanan	Terselenggaranya Koordinasi Program dan Kebijakan Sektor Kehutanan
3	Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Tersusunnya Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
4	Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
5	Pengembangan Basis Data Sektor Kehutanan untuk Mendukung Pengembangan Hasil Hutan non Kayu	Tersedianya Basis Data Sektor Kehutanan untuk Mendukung Pengembangan Hasil Hutan non Kayu
III	DIREKTORAT KELAUTAN DAN PERIKANAN	
1	Penyusunan Background study RPJMN Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014	Tersusunnya Background study RPJMN Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014
2	Koordinasi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Koordinasi Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan
3	Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Tersusunnya Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
4	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan	Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan
5	Pengembangan Database Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Tersedianya Database Pembangunan Kelautan dan Perikanan
IV	DIREKTORAT SUMBER DAYA ENERGI, MINERAL DAN PERTAMBANGAN	
1	Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Mineral, Energi dan Pertambangan	Terselenggaranya Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Mineral, Energi dan Pertambangan
2	Pemantauan Program-Program Pembangunan Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Pertambangan	Tersusunnya Laporan pemantauan Pembangunan Bidang sumbr Daya Mineral, Energi dan Pertambangan
3	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang SDM dan Pertambangan	Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang SDM dan Pertambangan
4	Pengembangan Database Sumber Daya Mineral dan Pertambangan	Tersedianya Database Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
5	Kajian Pasca Operasi Kegiatan Pertambangan	Tersusunnya Rekomendasi Kajian Pasca Operasi Kegiatan Pertambangan
V	DIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP	
1	Kajian Adaptasi Sektor Pembangunan terhadap Perubahan Iklim	Tersusunnya Rekomendasi Kajian adaptasi Dampak Perubahan Iklim Pada Rencana Strategis
2	Koordinasi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Koordinasi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
3	Monitoring Pelaksanaan RPJM dan RKP Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2008	Tersusunnya Laporan Monitoring Pelaksanaan RPJM dan RKP Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2008
4	Evaluasi Pelaks. Prog. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk. Hidup RKP Tahun 2006	Tersusunnya Evaluasi Pelaks. Prog. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk. Hidup RKP Tahun 2006
5	Penyusunan dan Pemutakhiran Database Kegiatan Perencanaan Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup	Tersedianya Database Kegiatan perencanaan Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

PASKAH SUZETTA

ANAK LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR PER.007 /M.PPN/11/2007
TANGGAL 30 NOVEMBER 2007

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Terselenggaranya Koodinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana
I	DIREKTORAT PENGAIRAN DAN IRIGASI	
1	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air	Tersusunnya Road Map Pembanguan Sumber Daya Air
2	Kajian Skema Pembiayaan dan Implementasi Penanganan Banjir di Kota-Kota Besar	Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air terpadu di Wilayah Jakarta dan Sekitarnya
3	Monitoring Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air	Terlaksananya kegiatan koordinasi yang efektif antar sektor dan antar pelaku lainnya dalam perencanaan program pembangunan sumber daya air dan implementasi program serta mengoptimalkan output yang akan dihasilkan
4	Penyusunan Database Pembangunan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air	Terlaksananya pemantauan terhadap program - program pembangunan bidang sumber daya air, terutama dari segi konsistensinya terhadap dokumen perencanaan dan dokumen kebijakan pengelolaan sumber daya air yang telah disepakati bersama dan ditetapkan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 - 2009 dan Undang - Undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air serta peraturan perundangan yang berlaku lainnya.
5	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air	Terlaksananya evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program pembangunan bidang sumber daya air sesuai dokumen RPJM 2004 - 2009 dan RKP tahun 2006 serta peraturan perundangan yang berlaku lainnya.

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
6	Koordinasi Strategis Tim Pengarah Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air	Terselenggaranya Koodinasi Strategis Tim Pengarah Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air
	PPK Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu :	
7	Water Resources And Irrigation Sector Management Program	Terlaksananya tugas sekertariat NSWCR sehingga selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan sumber daya air melalui monitoring, evaluasi dan koordinasi antar stakeholder
8	Participatory Irrigation Sector Project	Tersusunnya Rekomendasi Kajian Kelembagaan, Program dan Investasi Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia
II	DIREKTORAT TRANSPORTASI	
1	Kajian Awal Roadmap Perencanaan Pembangunan Transportasi Nasional Jangka Menengah dan Panjang (Persiapan RPJM 2010-2014)	Tersusunnya Rekomendasi Kajian Awal Roadmap Perencanaan Pembangunan Transportasi Nasional Jangka Menengah dan Panjang (Persiapan RPJM 2010-2014)
2	Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan Program/Kegiatan Sektor Transportasi Tahun 2008	Tersusunnya Laporan Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan Program/Kegiatan Sektor Transportasi Tahun 2008
3	Penyusunan Database Perencanaan Pembangunan Sektor Transportasi Tahun 2008	Tersedianya Database Perencanaan Pembangunan Sektor Transportasi Tahun 2008
4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan sektor Transportasi Tahun 2008	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan sektor Transportasi Tahun 2008
5	Evaluasi Program Pembangunan Sektor Transportasi (kasus Sub Sektor Transportasi Udara)	Tersusunnya Laporan Evaluasi kegiatan Pembangunan sektor Transportasi (kasus Sub Sektor Transportasi Udara)
6	Developing New Approach to Road Management and Maintenance System Toward The More Integrated Transportation Management System (Loan RR2P)	Terselenggaranya dukungan kesekretariatan Loan RR2P
III	DIREKTORAT PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
1	Kajian Penyusunan Konsep, Program dan Pola Investasi Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia	Tersusunnya Rekomendasi Kajian Penyusunan Konsep, Program dan Pola Investasi Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia
2	Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan dan Pemukiman	Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan dan Pemukiman

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
3	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman	Tersusunnya Laporan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman
4	Pengembangan Database Pembangunan Permukiman dan Perumahan	Tersedianya Database Pembangunan Permukiman dan Perumahan
5	Koordinasi Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman	Terselenggaranya Koordinasi Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman
IV	DIREKTORAT ENERGI, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor energi, Telematika dan Ketenagalistrikan	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor energi, Telematika dan Ketenagalistrikan
2	Penyusunan Database Pembangunan Sektor Energi, Telematiak dan Ketenagalistrikan	Tersedianya Database Pembangunan Sektor Energi, Telematiak dan Ketenagalistrikan
3	Kajian Strategi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Bidang Energi	Tersusunnya Rekomendasi Kajian Strategi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Bidang Energi
4	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan sektor Energi, Telematika dan Ketenagalistrikan	Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan sektor Energi, Telematika dan Ketenagalistrikan
5	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Sektor Energi, Telematika dan Ketenagalistrikan	Tersusunnya Laporan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Sektor Energi, Telematika dan Ketenagalistrikan
V	DIREKTORAT PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA	
1	Sekretariat Pelaksana Harian Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KPPI)	Terselenggaranya Sekretariat Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
2	Sosialisasi Program Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pengembangan Infrastruktur	Terselenggaranya Sosialisasi Program Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pengembangan Infrastruktur
3	Kajian Bentuk Kerjasama Sesuai dengan Iklim Investasi Infrastruktur di Indonesia	Tersusunnya Rekomendasi Kajian Bentuk Kerjasama Sesuai dengan Iklim Investasi Infrastruktur di Indonesia
4	Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur	Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur
5	Peningkatan Koordinasi Perencanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
6	Monitoring Pelaksanaan Program/Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur	Tersususunnya Laporan Monitoring Pelaksanaan Program/Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur
7	Penyusunan dan Pemutakhiran Database Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta	Tersedianya Database Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta
8	Fasilitasi Pengembangan Proyek Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (IRSDP)	Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan Proyek Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (IRSDP)
9	Support for Infrastructure Development (SID)	Terselenggaranya dukungan kesekretariatan SID

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

PASKAH SUZETTA

ANAK LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR PER. 007 /M.PPN/11/2007
TANGGAL 30 NOVEMBER 2007

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang pengb. Regional dan Otonomi Daerah

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah	Terselenggaranya Koodinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
I	DIREKTORAT KEWILAYAHAN I	
1	Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Pengembangan Wilayah	Terselenggaranya Koordinasi, Kerjasama Perencanaan Pengembangan Wilayah
2	Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah
3	Pemantauan Pelaksanaan Program-Program Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	Tersusunnya Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program-Program Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah
4	Pengembangan dan Pemanfaatan Basis Data Regional	Tersedianya Basis data Regional
5	Pengembangan Model Keterkaitan Regional	Terlaksananya Pengembangan Model Keterkaitan Regional
II	DIREKTORAT OTONOMI DAERAH	
1	Studi Evaluasi (Impact) Penataan Daerah Otonom Baru (* dgn komposisi belanja swakelola/kajian)	Tersusunnya Laporan Studi Evaluasi (Impact) Penataan Daerah Otonom Baru (* dgn komposisi belanja swakelola/kajian)
2	Koordinasi Penyusunan RKP 2009 Program-Program Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan RKP 2009 Program-Program Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah
3	Monitoring Pelaksanaan Program-Program Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah (RKP 2007)	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan RKP 2008 bidang Otonomi Daerah
4	Evaluasi RKP 2007 Program-Program Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi RKP 2007 Program-Program Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah
5	Penyusunan database Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Tersusunnya Database Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang pengb. Regional dan Otonomi Daerah

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
III	DIREKTORAT PEREKONOMIAN DAERAH	
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Perekonomian Daerah	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Perekonomian Daerah
2	Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Perekonomian Daerah	Terselenggaranya Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Perekonomian Daerah
3	Pengembangan Database di Bidang Perekonomian Daerah	Pengembangan Database di Bidang Perekonomian Daerah
4	Kajian Tentang Praktek-praktek Terbaik Dalam Pengembangan Investasi di Daerah	Tersusunnya Rekomendasi Kajian Tentang Praktek-praktek Terbaik Dalam Pengembangan Investasi di Daerah
5	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Perekonomian Daerah	Tersusunnya laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Perekonomian Daerah
6	Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	Terselenggaranya Koordinasi Strategis Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus
IV	DIREKTORAT PERKOTAAN, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	
1	Background Study Penyusunan Kebijakan Jangka Menengah Bidang Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan	Tersusunnya Study Penyusunan Kebijakan Jangka Menengah Bidang Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan	terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan
3	Pemantauan Perencanaan Pembangunan di Bidang Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan	Tersusunnya Laporan Pemantauan Perencanaan Pembangunan di Bidang Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan
4	Evaluasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan	Tersusunnya Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan
5	Penyusunan Database di Bidang Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan	Tersedianya Database di Bidang Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan
6	Koordinasi Tata Ruang (BKTRN), Perkotaan, dan Pertanahan Nasional	Terselenggaranya Koordinasi Tata Ruang (BKTRN) dan Pertanahan Nasional
V	DIREKTORAT KEWILAYAHAN II	
1	Kajian Strategi Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Kawasan Tertinggal, Perbatasan, Daerah Pasca Konflik dan Rawan Bencana sebagai Modal Utama untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Rekomendasi Kajian Strategi Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Kawasan Tertinggal, Perbatasan, Daerah Pasca Konflik dan Rawan Bencana sebagai Modal Utama untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang pengb. Regional dan Otonomi Daerah

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
2	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Andalan dan Kawasan Tertinggal/Perbatasan Berbasis Produk Unggulan	Terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Andalan dan Kawasan Tertinggal/Perbatasan Berbasis Produk Unggulan
3	Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Andalan dan Tertinggal/Perbatasan K/L Mitra Kerja	Tersusunnya Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Andalan dan Tertinggal/Perbatasan K/L Mitra Kerja
4	Evaluasi Kebijakan Perencanaan Program Pembangunan Kawasan Andalan Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Program Pembangunan Kawasan Andalan Strategis dan Cepat Tumbuh
5	Pengembangan Database dan Informasi Pembangunan Kawasan Andalan, Strategis, dan Cepat Tumbuh	Tersedianya Database Program Pembangunan Kawasan Andalan
6	Koordinasi Tim Teknis Asistensi Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat	Terselenggaranya Koordinasi Tim Teknis Asistensi Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat
7	Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Pasca Konflik (P2DTDPK)	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Pasca Konflik (P2DTDPK), Loan Bank Dunia, Pendukung dana Hibah UNDP untuk Reintergrasi GAM dan Daerah Pasca Konflik
8	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)	Terselanggaranya Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B) (pendukung hibah AUSAID & JICA)

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

PASKAH SUZETTA

ANAK LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR PER. 007 /M.PPN/11/2007
TANGGAL 30 NOVEMBER 2007

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	Terselenggaranya Koodinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan
I	DIREKTORAT ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN	
1	Kajian Sumber-Sumber Pendanaan	Tersusun Rekomendasi Kajian Sumber-Sumber Pendanaan
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan
3	Pemantauan Alokasi Pendanaan Pembangunan	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pemantauan Alokasi Pendanaan Pembangunan
4	Evaluasi Alokasi Pendanaan Pembangunan	Tersusunnya Laporan Evaluasi Alokasi Pendanaan Pembangunan
5	Pengembangan dan Pemutakhiran Database Pendanaan Pembangunan	Tersedianya Database Pendanaan Pembangunan
6	GFMRAP Subkomponen Perencanaan dan Penganggaran	Terlaksananya Pendampingan Kegiatan GFMRAP Subkomponen Perencanaan dan Penganggaran
7	GFMRAP Subkomponen Perencanaan dan Penganggaran (PHLN)	Terlaksananya Kegiatan GFMRAP Subkomponen Perencanaan dan Penganggaran
II	DIREKTORAT PENDANAAN LUAR NEGERI BILATERAL	
1	Kajian Peningkatan Harmonisasi Kerjasama Bilateral Negara-Negara Non-OECD	Tersusunnya Rekomendasi Kajian Peningkatan Kerjasama Bilateral Negara-Negara Non-OECD
2	Koordinasi Perencanaan Pendanaan Luar Negeri Bilateral	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pendanaan Luar Negeri Bilateral
3	Pemantauan Perencanaan Kegiatan PHLN Bilateral	Tersusunnya Laporan Pemantauan Perencanaan Kegiatan PHLN Bilateral
4	Pengembangan Database Pendanaan Luar Negeri Bilateral	tersedinya Database Pendanaan Luar Negeri Bilateral
5	Kegiatan Pendukung Pelaksanaan SOAg MCA	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan SOAg MCA
6	Evaluasi Kebijakan Donor Bilateral	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kebijakan Donor Bilateral
III	DIREKTORAT PENDANAAN LUAR NEGERI MULTILATERAL	

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
1	Kajian Tentang Optimalisasi Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa	Tersusunnya Rekomendasi Kajian Tentang Optimalisasi Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa
2	Koordinasi Persiapan Pinjama Program dan Proyek yang akan dibiayai pnjaman/hibah Luar Negeri Multilateral	Terselenggaranya Koordinasi Penyiapan Program/Proyek yang akan dibiayai pinjaman/hibah Luar Negeri Multilateral
3	Pemantauan Perencanaan Kegiatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Multilateral	tersusunnya Laporan Pemantauan Perencanaan Kegiatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Multilateral
4	Pengembangan dan Pemutakhiran Database pendanaan Luar Negeri Multilateral	Tersedianya Database pendanaan Luar Negeri Multilateral
5	Kegiatan Pendukung TA Strengthening capacity to improve aid effectiveness	terselenggaranya Dukungan TA Strengthening capacity to improve aid effectiveness
IV	DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PENDANAAN PEMBANGUNAN	
1	Kajian Evaluasi Proyek Pembangunan : Analisis Project Completion Reports	Tersusunnya Rekomendasi Kajian Evaluasi Proyek Pembangunan
2	Penyempurnaan Program Aplikasi Database Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Terselenggaranya Penyempurnaan Program Aplikasi Database
3	Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsolidasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
V	DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDANAAN PEMBANGUNAN	
1	Koordinasi Penyusunan Usulan Daftar Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Usulan Daftar Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri
2	Pengelolaan Sistem Informasi Terpadu	Terkelolanya Sistem Informasi Terpadu
3	Evaluasi Sistem Pendanaan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Sistem Pendanaan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

PASKAH SUZETTA

ANAK LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR PER. 007 /M.PPN/11/2007
TANGGAL 30 NOVEMBER 2007

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
I	DIREKTORAT EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	
1	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 33 Provinsi	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 33 Provinsi
2	Kajian Pengembangan Indikator Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Kajian Pengembangan Indikator Pembangunan Daerah
3	Evaluasi Kinerja Pembangunan Berkelanjutan Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Berkelanjutan Daerah
4	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5	Penyusunan Database Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Tersedianya Database Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
II	DIREKTORAT EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SEKTORAL	
1	Pemantauan Kinerja Pembangunan Sektoral	Tersusunnya Laporan Pemantauan Kinerja Pembangunan Sektoral
2	Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral	Terselenggaranya Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral
3	Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral
4	Pengembangan Database Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral	Tersedianya Database Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral
III	DIREKTORAT SISTEM DAN PELAPORAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	
1	Koordinasi dan Konsolidasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Terkonsolidasinya Laporan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
2	Studi dan Pemetaan Kebijakan Dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah
3	Pengembangan Database Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan	Tersedianya Database Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

PASKAH SUZETTA

ANAK LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR PER. 007 /M.PPN/11/2007
TANGGAL 30NOVEMBER 2007

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Inspektorat Utama

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
1	Seminar Peran APIF dalam Proses Penyusunan RKP	Terselenggaranya Seminar Peran APIF dalam Proses Penyusunan RKP
2	Audit Perencanaan Proses Pengawalan Penyusunan RKP dan Pelaksanaannya	Terselenggaranya Audit Perencanaan Proses Pengawalan Penyusunan RKP dan Pelaksanaannya
3	Sosialisasi Audit Terhadap Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemanfaatan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	Terselenggaranya Sosialisasi Pedoman Audit Terhadap Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemanfaatan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa
I	INSPEKTORAT BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
1	Kegiatan Pemeriksaan/Audit	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan/Audit Kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas
2	Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Review Laporan Keuangan dan LAKIP	Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Review Laporan Keuangan dan LAKIP
3	Kegiatan Review TOR dan RAB	Terselenggaranya Kegiatan Review TOR dan RAB
4	Monitoring Pengawasan Anggaran	Tersusunnya Laporan Monitoring Pengawasan Anggaran
5	Koordinasi Pengawasan Anggaran	Terselenggaranya Koordinasi Pengawasan Anggaran
6	Kegiatan Kontes PPK	Terselenggaranya Kegiatan Kontes PPK
7	Workshop Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah	Terselenggaranya Workshop Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah
8	Seminar Ketaatan	Terselenggarannya Seminar Ketaatan
9	Up Date Data Base Pengawasan Anggaran	Tersedianya Data Base Pengawasan Anggaran yang mutakhir
II	INSPEKTORAT BIDANG KINERJA KELEMBAGAAN	
1	Koordinasi Pengawasan Kinerja kelembagaan	Terselenggaranya Koordinasi Pengawasan Kinerja kelembagaan

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
2	Monitoring Pengawasan Kinerja Kelembagaan	Tersusunnya Laporan Monitoring Pengawasan Kinerja Kelembagaan
3	Evaluasi Kinerja Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas
4	Evaluasi Kinerja Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas
5	Seminar Pengawasan Kinerja Kelembagaan	Terselenggaranya Seminar Pengawasan Kinerja Kelembagaan
6	Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Kinerja Kelembagaan	Tersedianya DataBase Pengawasan Kinerja Kelembagaan

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

PASKAH SUZETTA

ANAK LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR PER. 007 /M.PPN/11/2007
TANGGAL 30 NOVEMBER 2007

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
I	KEGIATAN STAF AHLI MENEG PPN:	
1	Kajian Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Pembangunan Alternatif	Tersusunnya Rekomendasi Kajian Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Pembangunan Alternatif
2	Kajian Evaluasi Daerah Pemekaran	Tersusunnya Rekomendasi Kajian Evaluasi Daerah Pemekaran
3	Kajian Penyusunan Peta Resiko Bencana	Tersusunnya Rekomendasi Kajian Penyusunan Peta Resiko Bencana
4	Studi Kebijakan Pembangunan Manusia Indonesia	Tersusunnya Rekomendasi Studi Kebijakan Pembangunan Manusia Indonesia
5	Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Peaturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Di kementerian/Lembaga dan Daerah	Tersusunnya Rekomendasi Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Peaturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Di kementerian/Lembaga dan Daerah
6	Kajian Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Berdasarkan International Convention On Economic, Social Cultural Right	Tersusunnya Rekomendasi Kajian Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Berdasarkan International Convention On Economic, Social Cultural Right
7	Kajian Audit Organisasi Instansi Pemerintah	Tersusunnya Rekomendasi Kajian Audit Organisasi Instansi Pemerintah
II	BIRO HUMAS	
1	Koordinasi Penyiapan dan Finalisasi Bahan Pimpinan	Terselenggaranya Penyiapan dan Finalisasi Bahan Pimpinan
2	Peningkatan Fungsi Kehumasan	Terselenggaranya Kegiatan di Bidang Kehumasan, Media Massa, dan Hubungan Antarlembaga
3	Penyusunan dan Penyebarluasan Dokumen Produk Bappenas	Tersusunnya dan tersebarnya Dokumen Produk Bappenas
4	Penyelenggaraan Persidangan dan Protokol	Terselenggaranya Kegiatan Persidangan dan Keprotokolan

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
III	BIRO HUKUM	
1	Kajian Pengembangan Pelayanan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Tatanan Hukum	Terwujudnya Biro Hukum yang kompeten, Terselenggaranya koordinasi yang baik antar staf Biro Hukum dan antara Biro Hukum dengan stakeholder
2	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	TerselenggaranyaKoordinasiPenyusunan Peraturan Perundang-undangan
3	Pemeliharaan Sistem Informasi Hukum dan Pemutakhiran Data (Database)	Tercipta Sistem Informasi Hukum Yang Baik
4	Kajian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya Rekomendasi Kajian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum
5	Kegiatan Pelayanan Hukum (Non Litigasi)	Terwujudnya koordinasi yang baik, kelengkapan, kesiapan dan finalisasi peraturan yang akan diterbitkan
6	Kegiatan Litigasi dan Pendampingan Hukum	Selesainya perkara hukum baik perdata, tata usaha negara maupun pendampingan perkara pidana
IV	BIRO KEPEGAWAIAN	
1	Evaluasi Pemetaan Kompetensi Manajerial	Tersusunnya Laporan Evaluasi Pemetaan Kompetensi Manajerial
2	Kajian Penyusunan Sistem Penghargaan (Reward) Pegawai	Tersusunnya Kajian Penyusunan Sistem Penghargaan (Reward) Pegawai
3	Pemuktahiran Data Kepegawaian	Termutakhirkannya Data Kepegawaian
4	Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional
5	Tim Baperjakat	Terselenggaranya penilaian terhadap pegawai
6	Koordinasi Pembinaan Kepangkatan Pegawai	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Kepangkatan Pegawai
7	Rekruitment Pegawai Baru	Terselenggaranya Recruitment Pegawai Baru
8	Pembinaan dan Peningkatan kesejahteraan Pegawai	Terselenggaranya Pembinaan dan Peningkatan kesejahteraan Pegawai
V	BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA	
1	Koordinasi Perencanaan dan Ketatalaksanaan Kementerian Negara PPN/Bappenas	Terselenggaranya koordinasi perencanaan dan ketatalaksanaan Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2008
2	Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas	Terselenggaranya Pemantauan Kegiatan/ Program Di Lingkungan Kantor Meneg.PPN/ Bappenas Tahun 2008
3	Penyusunan Database Kegiatan dan Anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas 2008	Tersusunnya database kegiatan tahun 2008

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Bappenas Tahun 2007
5	Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Kementerian Negara PPN/Bappenas	Tersusunnya Pedoman ketatalaksanaan Kementerian Negara PPN/Bappenas
6	Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Perencanaan	Terselenggaranya Kerjasama Kelembagaan Perencanaan
7	Koordinasi Penyusunan Jurnal Kajian Bappenas	Tersusunnya Jurnal Kajian Bappenas
8	Koordinasi Tim Anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas	Terselenggaranya rapat kerja Tim Anggaran tahun 2008
9	Evaluasi Organisasi Kementerian Negara PPN/Bappenas	Tersusunnya laporan Evaluasi Organisasi Kementerian Negara PPN/Bappenas
VI	BIRO UMUM	
1	Pemutakhiran Data Pengontrolan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Tersusunnya database pengontrolan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
2	Pemutakhiran Data Penggajian	Tersusunnya database penggajian
3	Pemutakhiran Data Arsip Persuratan	Tersusunnya database arsip persuratan
4	Pemutakhiran Data Persediaan ATK	Tersusunnya database persediaan ATK
5	Pemutakhiran Data Penatausahaan Kendaraan Dinas	Tersusunnya database penatausahaan kendaraan dinas
6	Koordinasi Urusan Dalam	Terselenggaranya koordinasi urusan dalam
7	Koordinasi Pengelolaan Keuangan	terselenggaranya koordinasi pengelolaan keuangan
8	Koordinasi Verifikasi Anggaran	terselenggaranya koordinasi verifikasi anggaran
9	Koordinasi Perlengkapan dan Tata Usaha	terselenggaranya perlengkapan dan tata usaha
10	Pencetakan Dokumen/Buku	Tersedianya Dokumen/Buku Produk Bappenas
VII	KOORDINASI SESMENEG PPN/SESTAMA BAPPENAS	
1	Penyusunan RKP 2009	Tersusunnya RKP 2009
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Daerah	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Lintas Sektor
3	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
4	Sosialisasi PP. 39 dan 40	Tersosialisasi PP. 39 dan 40
5	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Sosialisasi Pelaksanaan RPJP	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Perencanaan dan Sosialisasi Pelaksanaan RPJP
6	Konsultasi dan Komunikasi Publik RPJMN 2010-2014	Terselenggaranya Konsultasi dan Komunikasi Publik RPJMN 2010-2014

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
7	Rapat Kerja Internal Bappenas	Terselenggaranya Rapat Kerja Internal Bappenas
8	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
9	Koordinasi dan Pembinaan Program Pembangunan Nasional	Terselenggaranya Koordinasi dan Pembinaan Program Pembangunan Nasional
10	Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terselenggaranya Koordinasi dPengadaan Barang dan Jasa
11	Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2010-2014	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2010-2014
12	Koordinasi Pembinaan Pegawai	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Pegawai
VIII	PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
1	Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terkelolanya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	Mekanisme Pengelolaan Data pada Kantor Meneg PPN/Bappenas	Terkelolanya Data pada Kantor Meneg PPN/Bappenas
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi (* mencakup SKIEB, ELS, Help Desk, Situs)	Terpeliharanya Sistem Informasi (* mencakup SKIEB, ELS, Help Desk, Situs)
4	Pengelolaan Integrasi Data Perencanaan Pembangunan	Terkelolanya Data Perencanaan Pembangunan
5	Koordinasi dan Pemantauan Pengelolaan Database Bappenas	Terpantaunya pengembangan database pembangunan di Bappenas
6	Penyusunan dan Pemutakhiran Database Infrastruktur Pusdatin	Tersedianya Database Infrastruktur Pusdatin
7	Sosialisasi dan Penerapan Sistem Basis Data Pembangunan Simrenas	Tersebarluaskannya kebijakan-kebijakan baru, program aplikasi baru, tentang pengumpulan,pengolahan dan penyajian data dan informasi pembangunan yang diperlukan institusi perencanaan di pusat dan daerah;
8	Sewa Layanan Akses Sistem Digital Journal	Tersedianya layanan Digital jurnal melalui aplikasi berbasis web
IX	PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK	
1	Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Barang/Jasa Pemerintah	Terselenggaranya Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2	GFMRAP Sub Komponen Pengadaan (RM)	terselenggaranya Kegiatan GFMRAP Sub Komponen Pengadaan
3	GFMRAP Sub Komponen Pengadaan (Loan Bank Dunia)	terselenggaranya Kegiatan GFMRAP Sub Komponen Pengadaan (Loan Bank Dunia)

Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2008

Unit Kerja Eselon I : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

No	UNIT KERJA/ NAMA KEGIATAN	KELUARAN
5	Strengthening National Capacity For Public Monitoring Government Reform (RK/PLN)	Terselengaranya Kegiatan Strengthening National Capacity For Public Monitoring Government Reform (RK/PLN)
8	Pengembangan 5 Pusat Layanan Regional Dalam Rangka Pengemb. Pengadaan Secara Elektronik (Hibah MCC USAID/RM)	Terbentuknya 5 Pusat Layanan Regional Dalam Rangka Pengemb. Pengadaan Secara Elektronik (Hibah MCC USAID)
X	PRAKARSA STRATEGIS	
1	Penyusunan Strategi Pengembangan Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua	Tersusunnya Strategi Pengembangan Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
2	Review Kebijakan Pembangunan SDM dan Kebudayaan Jangka Menengah	Tersusunnya Review Kebijakan Pembangunan SDM dan Kebudayaan Jangka Menengah
3	Penyusunan Strategi Nasional Pembangunan Sumber Daya Air Terpadu	Tersusunnya Strategi Nasional Pembangunan Sumber Daya Air Terpadu
4	Proses Kebijakan Strategis di Indonesia-Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Tersusunya Proses Kebijakan Strategis di Indonesia-Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

PASKAH SUZETTA